



## ABSTRACT

This research examines the conception of well-being (*sejahtera*) among the Indigenous Baduy Community through a relational understanding that integrates social, ecological, and spiritual dimensions. Unlike conventional well-being frameworks that measure success through individual economic indicators such as GDP and HDI, the Indigenous Baduy Community understands *sejahtera* as an ontological phenomenon emerging from disciplined relationships among humans, land, and the unseen world.

Using three months of ethnographic fieldwork (November 10<sup>th</sup>, 2024–February 2<sup>nd</sup>, 2025) and analysis through Karen Barad's agential realism and Linda Tuhiwai Smith's self-determination theory, this research demonstrates that land (Tanah Ulayat) is not merely a passive resource but an active moral and spiritual agent that participates in shaping community well-being. The land responds to human behavior through ecological phenomena—fertility when *adat* is followed, drought and disasters when violated—revealing that ecological stability depends on human ethical adherence to *pikukuh* (ancestral law).

The study analyzes *ngahuma* (swidden farming) as a material-discursive system where meaning and matter mutually constitute one another. Through practices such as *pengliburan* (forbidden work days), the prohibition against selling *pare huma* (sacred swidden rice), and seasonal rituals (*narawas*, *ngaseuk*, *mipit*), the Indigenous Baduy Community performatively enact boundaries that protect the relationships producing *sejahtera*. These practices are not merely cultural customs but agential cuts that determine what matters and what is excluded in the phenomenon of well-being.

Findings reveal *sejahtera* as an ongoing process maintained through *cukup* (sufficiency), *rukun* (pillars), and *ngajalanan kawajiban* (fulfillment of obligations toward *adat*). The Indigenous Baduy Community's strategic refusal of government development funds and their refusal to commodify *pare huma* demonstrate ontological sovereignty—the right to define value, progress, and well-being according to their own knowledge systems.

This research contributes to three areas: (1) extending global indigenous well-being frameworks by demonstrating how non-human agency materially shapes well-being; (2) indigenizing the One Health model by showing that ecological health is inseparable from moral and spiritual life; (3) bridging the gap in Baduy studies that systematically separates well-being research from ecological studies.

Policy implications include: adopting indigenous-centered well-being indicators that assess the quality of relationships rather than material accumulation; strengthening legal protection of indigenous land rights; respecting cultural and religious autonomy; reforming agricultural policies to support indigenous farming systems; and recognizing indigenous self-determination as a fundamental political right.



By demonstrating that the Indigenous Baduy Community's well-being emerges through ontological entanglement between human and non-human agencies, this research challenges anthropocentric development paradigms and offers a relational alternative for understanding the good life—an alternative urgently needed amid escalating ecological crises.

**Keywords:** holistic well-being, indigenous well-being, agential realism, Indigenous Baduy Community, non-human agency, swidden farming (*ngahuma*), self-determination, relational ontology, ontological sovereignty, One Health, *cukup*.



## INTISARI

Penelitian ini mengkaji konsepsi kesejahteraan Masyarakat Adat Baduy melalui pemahaman relasional yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekologis, dan spiritual. Berbeda dengan kerangka kesejahteraan konvensional yang mengukur kesuksesan melalui indikator ekonomi individual seperti GDP dan HDI, Masyarakat Baduy memahami sejahtera sebagai fenomena ontologis yang muncul dari hubungan yang disiplin antara manusia, tanah, dan dunia yang tak terlihat. Menggunakan kerja lapangan etnografis selama kurang lebih tiga bulan (10 November 2024–3 Februari 2025) dan analisis melalui agential realism Karen Barad serta teori penentuan nasib sendiri Linda Tuhiwai Smith, penelitian ini menunjukkan bahwa tanah bukan sekadar sumber daya pasif tetapi merupakan agen moral dan spiritual yang aktif berpartisipasi dalam membentuk kesejahteraan komunitas. Tanah merespons perilaku manusia melalui fenomena ekologis—kesuburan ketika adat diikuti, kekeringan dan bencana ketika dilanggar—menunjukkan bahwa stabilitas ekologis bergantung pada kepatuhan etis manusia terhadap *pikukuh* (hukum adat).

Studi ini menganalisis ngahuma (pertanian ladang berpindah) sebagai sistem material-diskursif di mana makna dan materi saling membentuk. Melalui praktik seperti pengliburan (hari istirahat yang dilarang bekerja), larangan menjual *pare huma* (padi ladang sakral), dan ritual musiman (*narawas*, *ngaseuk*, *mipit*), Masyarakat Baduy secara performatif memberlakukan batas-batas yang melindungi hubungan yang menghasilkan sejahtera. Praktik-praktik ini bukan sekadar kebiasaan budaya tetapi merupakan pemotongan agensial (*agential cuts*) yang menentukan apa yang penting dan apa yang dikecualikan dalam fenomena kesejahteraan.

Temuan mengungkapkan sejahtera sebagai proses berkelanjutan yang dipelihara melalui rasa cukup, rukun (keharmonisan sosial), dan ngajalanan kewajiban (pemenuhan kewajiban terhadap adat). Penolakan strategis Masyarakat Baduy terhadap dana pembangunan pemerintah dan penolakan untuk mengkomodifikasi *pare huma* menunjukkan kedaulatan ontologis—hak untuk mendefinisikan nilai, kemajuan, dan kesejahteraan menurut sistem pengetahuan mereka sendiri.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada tiga bidang: (1) memperluas kerangka kesejahteraan indigenous global dengan menunjukkan bagaimana agensi non-manusia secara material membentuk kesejahteraan; (2) mengindigenisasi model One Health dengan menunjukkan bahwa kesehatan ekologis tidak dapat dipisahkan dari kehidupan moral dan spiritual; (3) menjembatani kesenjangan dalam studi Baduy yang secara sistematis memisahkan penelitian kesejahteraan dari studi ekologi.

Implikasi kebijakan mencakup: mengadopsi indikator kesejahteraan yang berpusat pada masyarakat adat yang menilai kualitas hubungan daripada akumulasi material; memperkuat perlindungan hukum terhadap hak tanah adat; menghormati otonomi budaya dan agama; mereformasi kebijakan pertanian untuk mendukung sistem



pertanian indigenous, dan mengakui penentuan nasib sendiri masyarakat adat sebagai hak politik fundamental.

Dengan menunjukkan bahwa kesejahteraan Masyarakat Baduy muncul melalui keterjeratan (entanglement) ontologis antara manusia dan non-manusia, penelitian ini menantang paradigma pembangunan antroposentrik dan menawarkan alternatif relasional untuk memahami kehidupan yang baik—alternatif yang sangat dibutuhkan di tengah krisis ekologi yang semakin meningkat.

**Kata kunci:** kesejahteraan indigenous, agential realism, Masyarakat Adat Baduy, agensi non-manusia, pertanian ladang berpindah (*ngahuma*), penentuan nasib sendiri, ontologi relasional, kedaulatan ontologis, One Health, cukup.